

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Konsep Negara Pancasila

1. Pengertian Negara Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional, hal ini memberikan konsekuensi logis bahwasanya nilai-nilai pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi berdirinya negara Indonesia. Pancasila memuat lima sila yang pada dasarnya berisi lima dasar nilai yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila merupakan nilai Ketuhanan Yang maha Esa, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan kesimpulan secara ringkas menjelaskan nilai dasar Pancasila merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila dapat dimaknai sebagai ideologi negara daripada negara Indonesia atau disebut falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan pancasila sebagai dasar negara muncul pengertian bahwasannya negara indonesia merupakan Negara Pancasila. Negara Pancasila ialah negara yang didirikan dan mempertahankan kan serta mengembangkan bertujuan dan mengembangkan martabat dan hak-hak dari warga negara indonesia, agar supaya semua rakyat bisa hidup dengan layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya serta mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Handayani dan Dewi 2021).

Menurut Gesmi dan Hendri (2018), Pancasila merupakan falsafah dasar negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sansekerta. Panca mengandung arti lima dan sila mengandung arti prinsip dan asas. Pancasila adalah perincian dan aturan hidup berbangsa dan bernegara bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Notonegoro, Pancasila adalah dasar pemikiran negara Indonesia, sehingga cenderung disimpulkan bahwa Pancasila adalah landasan pemikiran dan falsafah negara yang oleh

sebagian besar orang menganggap bahwa sebagai pedoman hidup. Bagi rakyat Indonesia. sebagai persatuan, citra solidaritas, dan amanah. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Pancasila bermula dari panca yang bermakna arti lima dan sila yang berarti sendi asas, dasar, atau pedoman tingkah laku yang penting dan agung. Dengan demikian, Pancasila adalah lima aturan yang memuat kaidah-kaidah yang berkenaan dengan tingkah laku yang sopan dan patut.

Seperti yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno, Pancasila adalah inti dari identitas nasional Indonesia yang telah diwariskan sejak lama, namun telah terlupakan oleh budaya barat yang telah lama mempengaruhi. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar pandangan negara, tetapi lebih dari itu, yaitu pandangan khas negara Indonesia. Menurut Panitia Lima, Pancasila terdiri dari lima prinsip yang adalah ideologi negara. Kelima dari prinsip tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara kelima prinsip tersebut sangat erat, terhubung, dan tidak bisa berdiri sendiri. Lima pilar utama Pancasila adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua ini diuraikan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Gesmi dan Hendri 2018).

2. Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi menyimpulkan bahwa Pancasila adalah keyakinan, pemikiran, pengajaran, atau informasi kebenaran dan berubah menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia dan menjadi panduan dalam mengurus masalah-masalah yang dipandang oleh masyarakat dan negara apalagi negara Indonesia. Selanjutnya pemikiran Pancasila bersifat mendidik, doktrin, hipotesis serta informasi tentang keyakinan (ideologi) negara Indonesia diterima dan disusun dengan secara rinci serta memberikan pedoman dengan eksekusi yang jelas. Seperti yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut ideologi. Ini karena ada di dalam Pancasila mengandung pelajaran, pemikiran dan prinsip masyarakat Indonesia diterima

dengan valid, terorganisir secara sistematis dan memberikan pedoman hidup. Selain itu, Pancasila berperan sebagai sistem ideologi terbuka.

Dalam pengertian ini, pemikiran Pancasila dapat diadaptasi menghadapi berbagai zaman. Dia bisa beradaptasi dengan yang berbeda kondisi tanpa mengubah asli atau nilai yang terkandung di dalamnya. Gagasan tentang penerimaan ini sangat luar biasa dalam mengelola setiap perubahan budaya dinamis dan selanjutnya perkembangan inovasi yang tidak bisa menyangkal kehadirannya. Dari penjelasan tersebut, terdapat tiga tingkatan yang perlu diperhatikan. selain hal-hal lain, lebih tepatnya nilai tidak berubah atau nilai esensial, instrumen yang bisa berubah sesuai kondisi namun juga berstandar pada nilai fundamental, dan nilai praktis, lebih spesifik sebagai pelaksanaan nilai-nilai yang ada. Semua hal dipertimbangkan, enkapsulasi atau eksekusi nilai Nilai-nilai instrumental dan praksis bagaimanapun juga harus mengandung semangat dan jiwa dan raga yang serupa dengan sifat-sifat esensialnya (Safitri dan Dewi, 2021).

3. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Menurut Kaelan (1996), Pancasila yang terdiri dari lima sila pada dasarnya merupakan suatu sistem filsafat. Konsep sistem mengutip pada kesatuan antara bagian-bagian yang saling terikat dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, membuat kesatuan yang utuh. Umumnya, sistem memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, sistem memiliki bagian-bagian yang berperan masing-masing. Kedua, setiap bagian memiliki kegunaan tersendiri. Ketiga, bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Keempat, sistem secara menyeluruh dibuat dengan bertujuan mencapai tujuan sistem itu sendiri. Kelima, konteks yang kompleks seperti Pancasila, lima sila tersebut pada dasarnya memiliki makna dan fungsi yang berbeda, namun secara mendalam membentuk satu kesatuan yang sistematis. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terikat.

Dasar filsafat negara Indonesia terdiri dari lima sila, yang masing-masing memiliki prinsip-prinsip kebangsaan. Namun, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, artinya setiap sila merupakan unsur yang mutlak

dari Pancasila, membentuk kesatuan majemuk tunggal. Akibatnya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada dasarnya merupakan suatu kesatuan organik. Sila-sila Pancasila saling berhubungan, berkaitan, dan memberikan kualifikasi satu sama lain. Dengan demikian, Pancasila pada dasarnya adalah sebuah sistem, di mana bagian-bagian atau sila-sila saling terhubung erat membentuk sebuah struktur menyeluruh. Kesatuan sila-sila Pancasila ini memiliki level hubungan dan membentuk piramida hierarkis, dan sebagai konsekuensinya, saling memberikan kualifikasi satu sama lain.

Mereka tidak dapat dipakai secara terpisah sebagai dasar keagamaan negara. Setiap sila dapat diinterpretasikan dengan berbagai makna, sehingga Pancasila masih berlaku meskipun salah satu sila tidak ada. Kesatuan sila-sila Pancasila dengan susunan piramida hierarki ini merujuk pada sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar bagi sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berpihak pada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehingga dalam setiap sila terkandung pula sila-sila lainnya. Dengan demikian, ada penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu dalam mewujudkan sila-sila Pancasila, tanpa terpisahkan dari makna sila-sila lainnya dalam hubungan hierarkis piramida.

B. Kajian Tentang *Darul 'Ahdī wa Syahadah*

1. Definisi *Darul 'Ahdī wa Syahadah*

Menurut Bakhri (2020) pandangan Muhammadiyah tentang Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila disebut *Darul Ahdī wal-Syahadah*, yang secara harfiah berarti "negara kesepakatan dan kesaksian (pembuktian)". Muhammadiyah meyakini bahwa Indonesia adalah hasil kesepakatan dari semua komponen bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, dan agama. Sebagai bagian dari umat Islam, Muhammadiyah juga mendukung pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan Muhammadiyah

terhadap NKRI dan Pancasila adalah hasil dari proses yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk kelompok nasionalis sekuler, nasionalis islam, kelompok Islamis, dan kelompok non-Muslim, yang semua memiliki tujuan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Muhammadiyah berkomitmen untuk merawat kesepakatan ini selama memberikan manfaat bagi Islam dan umat Muslim, terutama di Indonesia.

Secara konseptual, *Darul Ahdi*, yang juga dapat disebut sebagai *Darussalam*, adalah negara yang mewujudkan kesepakatan dan kedamaian antara umat Islam dan non-Muslim. Negara ini menjamin kedamaian, kebebasan, serta perlindungan bagi praktik keyakinan *tauhidullah* dan ajaran Islam bagi para penganutnya. Di sisi lain, Negara Pancasila sebagai *Dar al-Syhadah* adalah negara yang menjadi saksi dan juga bukti bahwa umat Muslim harus secara masif memahami, menghayati, dan menerapkan Pancasila dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang sejatinya tidak bertentangan satu sama lain. Penguatan Pancasila dengan nilai-nilai ajaran Islam merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan dan konsensus nasional, terutama karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip tauhid bagi umat Islam, sesuai dengan pesan Ki Bagus Hadikusumo. Konsepsi ini, yang dijelaskan oleh Muhammadiyah, bertujuan untuk memberikan makna terhadap negara Pancasila di Indonesia. Namun, perbedaan konseptual ini mungkin terlihat saat dibandingkan dengan sistem pemerintahan di negara-negara lain yang bertujuan untuk menempatkan konsepsi *Darul Ahdi wal-Syhadah* dalam konteks sistem negara di dunia.

2. Sejarah *Darul 'Ahdi wa Syhadah*

Menurut Romadlan (2020), Muhammadiyah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah entitas Pancasila yang didirikan berdasarkan nilai-nilai bangsa yang mulia dan sejalan dengan ajaran Islam. Pemahaman Muhammadiyah mengenai konsep negara Pancasila ini berasal dari interpretasi ayat al-Qur'an surat Saba' ayat 15 yang menyatakan keberadaan negeri yang baik di dalam ampunan Allah. Dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, Muhammadiyah menyatakan bahwa NKRI

merupakan Negara Pancasila yang berdiri berdasarkan filosofi kebangsaan yang dimana sejalan dengan ajaran Islam. Dan lima sila dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara esensial sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diwujudkan dalam mencapai cita-cita umat Islam, yaitu *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*. Muhammadiyah meyakini bahwa NKRI sebagai Negara Pancasila yang bermakna, pemikiran, dan cita-cita mulia seperti yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 dapat diaktualisasikan sebagai negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di bawah ridha Allah SWT. NKRI sebagai Negara Pancasila merupakan hasil dari konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) dan menjadi tempat penyaksian serta kesaksian (*dar al-syahadah*) untuk mencapai kondisi yang aman dan damai (*dar al-salam*), dan untuk mencapai kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT.

Pandangan kebangsaan ini sejalan dengan aspirasi Islam mengenai negara ideal, yang merupakan "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*," sebuah negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah. Negara ideal ini diberkati oleh Allah karena penduduknya beriman dan bertakwa, mereka beribadah dan memajukan agama, menjalankan fungsi kekhalifahan tanpa menyebabkan kerusakan di dalamnya, menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah (*habluminallah*) dan dengan sesama (*habluminannas*), membangun hubungan yang sejajar dan berkualitas taqwa antara komponen bangsa dan manusia, serta menjadi bangsa terdepan yang terhormat sebagai khyaira ummah. Dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, negara Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslimnya harus terus dibangun menjadi Negara Pancasila yang Islami dan maju, menjadi peradaban utama bagi seluruh rakyat.

3. Konsep Negara Pancasila Sebagai *Darul 'Ahd wa Syahadah*

Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015), seluruh umat Islam, termasuk Muhammadiyah, harus berkomitmen untuk menggunakan Negara Pancasila sebagai tempat untuk menyatakan dan mewujudkan upaya dalam membangun kehidupan bangsa yang memiliki makna dan menuju kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks Negara Pancasila sebagai tempat yang digunakan untuk menyatakan keyakinan, umat Islam perlu siap untuk saling berlomba dalam mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan menggunakan kreativitas dan inovasi terbaik yang dimiliki. Sebagai komponen strategis dalam umat dan bangsa, Muhammadiyah memiliki peluang yang besar untuk menerapkan prinsip "*fastabiqul khairat*" ini dan menjadi kekuatan utama yang berada di garis depan dalam mengisi dan memimpin Negara Pancasila menuju kehidupan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan negara-negara maju dan beradab lainnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015), berpendapat bahwa Muhammadiyah, sebagai benteng strategis dalam umat dan bangsa, memiliki komitmen untuk menciptakan Negara Pancasila menggunakan pendekatan Islam yang progresif. Pendekatan Islam yang progresif ini menyebarkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, perdamaian, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keutamaan hidup yang dinamis bagi seluruh umat manusia. Pendekatan Islam ini juga menghargai martabat manusia tanpa adanya diskriminasi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Selain itu, pendekatan Islam yang progresif ini mendorong misi untuk melawan perang, terorisme, kekerasan, penindasan, keterbelakangan, dan kerusakan di dunia, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang merusak kehidupan. Pendekatan Islam yang progresif ini juga secara positif menghormati keragaman suku, bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di bumi ini. Dengan pandangan Islam yang progresif ini, Muhammadiyah bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang maju. Muhammadiyah berjuang di bawah bendera Negara Pancasila untuk memajukan Indonesia sesuai dengan identitasnya sendiri yaitu :

- a. Berusaha dan berjuang untuk perdamaian kejahteraan
- b. Membangun relasi dan menerapkan persaudaraan Islami
- c. Mempunyai pandangan yang terbuka dan luas dengan memegang teguh ajaran Islam
- d. Bersifat keagamaan dan sosial
- e. Menghormati semua hukum, undang-undang, peraturan, serta prinsip dan filosofi negara yang sah
- f. Menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam segala aspek kehidupan serta menjadi teladan yang baik
- g. Aktif dalam pembangunan masyarakat dengan tujuan reformasi dan pembangunan yang sesuai dengan ajaran Islam
- h. Kerjasama dan gotong royong dengan semua kelompok Islam dalam upaya penyebaran dan pengamalan agama Islam, serta membela kepentingannya
- i. Membantu pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai kelompok dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang sesungguhnya berdasarkan Islam
- j. Bersikap adil dan bijaksana dalam hubungan internal dan eksternal.

C. Kajian tentang Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Menurut Effendhie (2011), kata Organisasi berasal dari kata Yunani *organon* atau "*aparatus*". Dalam jangkauan sosiologi, asosiasi terfokuskan sebagai objek eksplorasi antara ilmu sosial, masalah keuangan, masalah legislatif, penelitian otak, studi manusia, sejarah, dan eksekutif, antara lain. Secara wajar ada dua implikasi yang berbeda untuk istilah organisasi (organisasi) sebagai suatu hal, yaitu suatu kompartemen untuk suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan pengorganisasian (*organizing*) sebagai suatu kata tindakan, untuk lebih spesifik suatu interaksi dan perkembangan latihan. bekerja secara efisien sebagai bagian dari pekerjaan untuk membangun dan membina organisasi atau sebagai salah satu penopang pengurus.

2. Tujuan Organisasi

Putri dan Maharani (2022), berpendapat bahwa organisasi diwajibkan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ini dapat disurvei dari beberapa sudut pandang, khususnya strategi, model ideal, dan proyek hingga tahap terakhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dari organisasi. Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuan memiliki arti dari tajuk yang direncanakan, arah yang diharapkan. Makna yang juga dapat digunakan dalam arti arah adalah sebagai keinginan. Keterikatan ini menunjukkan bahwa tujuan tidak sendirian, tujuan merupakan keadaan unggul yang harus dicapai mulai sekarang. Untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik di kemudian hari, diperlukan eksekusi yang lebih baik. Kinerja adalah petunjuk arah menuju tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, perkumpulan ataupun individu.

Secara keseluruhan, tujuan dari organisasi dapat dibedakan menjadi mikro (individu tertentu) maupun secara makro yaitu tujuan dari organisasi itu sendiri.

a. Tujuan secara Mikro

- 1) Menyediakan platform bagi anggota organisasi untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
- 2) Memaksimalkan kontribusi anggota organisasi dalam bidang spesifik yang mereka geluti.
- 3) Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan peran antara anggota organisasi.
- 4) Mengurangi dampak negatif pada anggota organisasi melalui motivasi kerja yang mendorong pertumbuhan mental individu.
- 5) Mengembangkan kemandirian anggota organisasi dalam menjalankan job desk mereka.

b. Tujuan secara Makro

- 1) Mengambil keputusan strategis untuk kepentingan organisasi guna mendukung implementasi program kerja yang optimal.
- 2) Membangun mekanisme kerja organisasi yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

- 3) Meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi sesuai dengan harapan mereka.
- 4) Memenuhi harapan masyarakat umum terhadap peran organisasi tersebut.
- 5) Meningkatkan nilai dan manfaat organisasi dengan menjalankan peran dan fungsi mereka masing-masing.

Adanya gambaran dari tujuan mikro dan makro sebagaimana ditulis diatas pada akhirnya terbentuknya sebuah organisasi besar harapan dapat mempermudah tercapainya harapan dan keinginan masyarakat dan dalam bidang tertentu

Maka dari itu, organisasi berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai dengan maksimal apabila segala sesuatunya yang menyangkut keberadaan organisasi itu telah disusun dan dirancang sedemikian rupa progam kerjanya sebelumnya. (Wahono, 2014)

3. Manfaat Organisasi

Menurut Cahyaning dan Klatsum (2015), Manfaat bergabung dengan organisasi kemahasiswaan, kita akan mendapatkan banyak keuntungan, dan ini bisa menjadi keterlibatan yang luar biasa dengan belajar dan sebagai dasar untuk mendapatkan pekerjaan baru. Berikut adalah beberapa keuntungan ketika kita bergabung dengan organisasi kemahasiswaan:

- a) Melatih Leadership
- b) Belajar Manajement Waktu
- c) Memperluas Jaringan atau Relasi.
- d) Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi,
- e) Problem Solving dan Manajemen Konflik.

4. Peran dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)

Menurut Kosasih (2016), organisasi kemahasiswaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan kewarganegaraan agar mahasiswa siap menghadapi kehidupan masyarakat. Menurut temuan dari penelitian dan diskusi tersebut, diketahui bahwa minat mahasiswa terhadap ormawa menurun

karena mereka lebih fokus pada prestasi akademik dan terpengaruh oleh gaya hidup hedonistik. Ormawa menggunakan berbagai media dalam melakukan sosialisasi, di mana media yang menarik digunakan untuk menyebarkan informasi terkait pelatihan yang diselenggarakan oleh ormawa dengan cepat dan tepat. Peran ormawa dalam meningkatkan kemampuan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) mahasiswa adalah sebagai wadah aspirasi dan untuk mendorong pemikiran yang fundamental, cermat, dan logis. Selama pelaksanaan kegiatan, ormawa menghadapi beberapa hambatan, baik dari internal maupun eksternal. Contohnya, kendala terkait subsidi, perizinan, gaya hidup, korespondensi, dan koordinasi, kurangnya minat dari mahasiswa, perbedaan sekretariat mahasiswa, dan keterkaitan dengan sekretariat. Ormawa berusaha melindungi masyarakat, merencanakan program kerja dan materi yang kreatif, bertindak secara intelektual, mempromosikan perdamaian, mengawasi pelaksanaan ujian atau penilaian, serta menyelesaikan tugas ormawa secara keseluruhan dengan baik di lingkungan perguruan tinggi.

D. Kajian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

1. Sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Menurut Pribadi (2016), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sebagai salah satu komponen bangsa ini secara positif memainkan peran penting untuk menciptakan kehidupan negara yang unggul. Tuntutan zaman yang meyakini bahwa mahasiswa harus menjadi *Agen Of Change* di negara yang harus dimanifestasikan oleh IMM adalah tanggungjawab yang berat. Untuk menciptakan IMM sebagai *Agen Of Change*, diperlukan kader berkualitas dalam menjadi penggerak perjuangan Islam sehingga mereka mampu menggelar perubahan sosial. Seperti ORTOM Muhammadiyah yang bergerak dalam elemen perjuangan umat, IMM terlihat berkomitmen memunculkan sosok kader-kader yang istiqamah dan siap memperjuangkan realitas Islam dan dapat dijadikan contoh yang baik oleh seluruh *civil society*, terkhusus civita akademika kampus. Sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, maka IMM memperkokoh perkembangan dakwah di tengah-tengah masyarakat secara khusus di kalangan mahasiswa. Setiap bagian IMM harus memiliki opsi untuk mengkonsolidasikan kapasitas logis dan skolastik. Karenanya, setiap bagian IMM harus rajin

beribadah, pandai dalam ujian dan menyebarkan wawasan dakwah mereka sebagai penerapan sisi ketaqwaan kepada Allah swt. Sebagai organisasi kemahasiswaan tentang perkembangan beragama mahasiswa, IMM didirikan di Yogyakarta pada tanggal 29 Syawal 1384 H. atau sebaliknya bertepatan pada tanggal 14 Maret 1964. Kehadiran IMM di tengah gegap gempita generasi muda dan mahasiswa di Indonesia, di tengah-tengah umat dan negara diharapkan untuk menambah bekerja pada jaminan negara ini.

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (2011), IMM dibentuk berdasarkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal;. Faktor internal terkait dengan kondisi internal Muhammadiyah sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar Muhammadiyah, terutama dalam hal kebenaran umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

a. Faktor internal

Pentingnya faktor internal dalam pembentukan IMM dapat dilihat dari keyakinan yang kuat terhadap pengembangan Ideologi Muhammadiyah, gagasan, dan cita-cita Muhammadiyah. Pada awalnya, Muhammadiyah telah memiliki organisasi otonom mandiri seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi'atul Aisyiah, yang dianggap sangat kompeten dalam melibatkan mahasiswa dan pemuda Muhammadiyah dalam kegiatan ilmiah, keagamaan, dan sosial. Namun, pada Muktamar ke-25 di Jakarta pada tahun 1936, muncul impian untuk mendirikan universitas-universitas Muhammadiyah dan mengumpulkan mahasiswa Muhammadiyah dalam suatu wadah organisasi otonom.

b. Faktor eksternal

Sebelum kelahiran IMM, sebagian besar kader Muhammadiyah dibentuk oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Muhammadiyah juga memberikan dukungan dan subsidi kepada HMI dalam pelaksanaannya. Ada hubungan antara Muhammadiyah dan HMI. HMI adalah organisasi mahasiswa islam

yang berada di bawah Masyumi (untuk mahasiswa PII). Masyumi memiliki hubungan sosial dengan Muhammadiyah, terutama karena Muhammadiyah mendukung Masyumi dalam pemilihan umum tahun 1955 (seperti NU yang berubah menjadi partai politik). Perubahan dalam struktur organisasi kemahasiswaan terjadi antara tahun 1950 dan 1965. Seiring dengan meningkatnya kekuatan PKI di bidang politik menjelang tahun 1965, HMI, yang tidak bisa dibedakan dari Masyumi, menjadi target politik untuk menyembunyikan lawan politiknya, yaitu PKI. Situasi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa Muhammadiyah untuk memecah HMI dan melindungi kader-kader Muhammadiyah di dalamnya. Namun, kami melihat bahwa ini bukan semata-mata tindakan yang terpaksa, melainkan suatu keharusan dalam sejarah. (Pribadi, 2016)

2. Ideologi IMM

Pentingnya menanamkan nilai-nilai trilogi dan tri kompetensi dalam identitas setiap kader IMM tidak dapat disangkal. Pertama, dalam hal keagamaan (religiusitas), penting untuk mencapai keseimbangan antara melaksanakan ritual dan berbuat baik, serta menggunakan pengetahuan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan penguasa atau pemodal. Kedua, intelektualitas ditunjukkan melalui sikap terbuka, kemampuan menerima kritik, ketulusan hati, kesungguhan, dan penghormatan terhadap kebenaran. Ketiga, adalah kemanusiaan atau humanitas, yang mengharuskan kader IMM untuk menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan prinsip *fi ahsani taqwim* dalam bahasa Arab. Proses manusiawi ini merupakan perubahan yang fundamental dalam kesadaran manusia.

a. Enam Penegasan IMM

- 1) Mengonfirmasi bahwa IMM merupakan gerakan mahasiswa yang berbasis Islam.
- 2) Mengonfirmasi bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah dasar utama dalam perjuangan IMM.

- 3) Menegaskan bahwa peran mahasiswa dalam Muhammadiyah adalah sangat penting.
- 4) Menegaskan bahwasannya IMM adalah organisasi mahasiswa yang legal, dengan mengikuti semua hukum, peraturan, undang-undang, serta prinsip dan filosofi negara.
- 5) Menegaskan bahwa pengetahuan adalah praktik yang dijalankan dan diterapkan.
- 6) Menegaskan bahwa kegiatan IMM adalah sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diabdikan untuk kepentingan masyarakat.

b. Identitas IMM

- 1) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para kader yang aktif dalam berbagai bidang, seperti agama, sosial, dan perkembangan mahasiswa, dengan tujuan utama mencapai cita-cita Muhammadiyah.
- 2) Sejalan visi Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berusaha untuk memperkuat upaya dakwah di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa.
- 3) Tiap anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah diharapkan mampu menggabungkan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai keagamaan.
- 4) Oleh karena itu, setiap anggota dituntut untuk menjalankan ibadah dengan disiplin, bersemangat dalam menuntut ilmu, dan menerapkan pengetahuannya untuk meningkatkan ketakwan dan pengabdian kepada Allah Swt.

c. Nilai Dasar Ikatan

- 1) IMM merupakan gerakan mahasiswa yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan.
- 2) Segala bentuk gerakan IMM harus berlandaskan pada ajaran agama islam yang hanif dan berkarakter rahmatan lil alamin.
- 3) Segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kemunhkaratan adalah musuh dari gerakan IMM terhadap perlawanan terhadap kewajiban setiap kader IMM.

- 4) Sebagai gerakan mahasiswa yang berlandaskan Islam dan berangkat individu-individu mukmin, agar supaya kesadaran melakukan syariat Islam merupakan kewajiban dan sekaligus mempunyai tanggungjawab untuk mendakwahkan kebenaran ditengah masyarakat.
- 5) Kader IMM merupakan inti masyarakat majemuk, yang selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan dan kemaslahatan umat sesuai dengan pencerahan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw.

d. Tujuan IMM

Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

e. Peran IMM

- 1) Penting untuk memiliki keyakinan dan sikap religius yang kuat agar keberadaan di Ikatan di masa depan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mempertahankan nilai-nilai agama yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat.
- 2) Keberadaan anggota Ikatan harus didukung oleh wawasan dan kemampuan kepemimpinan yang baik, karena mereka memiliki potensi untuk menjadi kader yang berkualitas. Selain itu, menjadi seorang intelektual juga penting mengingat adanya profesionalitas yang dapat mempersempit cara berpikir dalam bidang-bidang kehidupan yang sempit.
- 3) Dalam konteks masa depan, wawasan dan keterampilan komunikasi sangat penting, mengingat dominasinya industri informasi dalam budaya kita. Kemampuan ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang selalu mendorong pelaksanaan perintah yang baik dan menolak perbuatan yang buruk sebagai esensi dari komunikasi Islami. (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 2011b)

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Said Romadlan 2020 Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah (Romadlan, 2020)</p>	<p>Hasil penelitian dari jurnal ini mempunyai kesimpulan sebagai berikut : mengutamakan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berkembang atas Pancasila sebagai dasar Kesimpulan dari penelitian jurnal ini adalah bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang berkembang, diberi prioritas sebagai dasar negara daripada Pancasila. Di tengah arus ideologi transnasional yang berupaya mendirikan negara Islam di Indonesia (khilafah) dan menggantikan dasar negara, perkuatan Pancasila sebagai dasar negara menjadi penting. Dalam konteks ini, pengaruh globalisasi dengan nilai-nilai neoliberalisme diperkirakan akan mempengaruhi pemahaman terhadap Pancasila. Selain itu, terdapat faktor internal berupa pengkultusan dan beberapa golongan yang mengklaim kebenaran makna Pancasila serta menganggap diri mereka sebagai golongan yang paling setia terhadap Pancasila. Oleh karena itu, tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang</p>	<p>Membahas mengenai Negara Pancasila sebagai <i>Darul 'Ahdi wa Syahadah</i></p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hermeneutika Paul Ricoeur yang menekankan penafsiran atas teks dengan proses penjarakan (distansiasi) antara teks dan pembaca., sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>

		berkemajuan, memahami proses pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara.		
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Anita Puji Astutik WAWASAN KEBANGSAA N: NEGARA PANCASILA SEBAGAI <i>Darul 'Ahdhi wa al Syahadah</i> tahun 2019 (Astutik, 2019)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, buku ini membahas beberapa topik yang meliputi perspektif terkait hubungan antara agama dan negara, khususnya hubungan antara Islam dan politik pada zaman sekarang. Buku ini juga membahas konsep wawasan kebangsaan serta peran historis Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Kontribusi Muhammadiyah dalam mengisi kehidupan kebangsaan dijelaskan, termasuk komitmen mereka terhadap Negara Pancasila yang dipandang sebagai tempat di mana mereka dapat bersaksi dan membuktikan diri dalam membangun kehidupan kebangsaan yang memiliki makna dan mengarah pada kemajuan di semua aspek kehidupan. Selain itu, buku ini juga menyoroti implementasi komitmen Muhammadiyah melalui tindakan nyata dan amal perbuatan.</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas mengenai Negara Pancasila sebagai <i>Darul Ahdhi wa Syahadah</i></p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah variabel dalam penelitian terdahulu merupakan warga persyarikatan sedangkan penelitian terbaru variabelnya mengenai kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya</p>
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Kusumawati, M. Pd. 2019 PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH PANCASILA SEBAGAI <i>DARUL AHDI WA SYAHADAH</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Muhammadiyah memutuskan Negara Pancasila adalah <i>Darul Ahdhi wa Syahadah</i>. Muhammadiyah berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila adalah bentuk negara yang ideal dan oleh karena itu harus dipertahankan.</p>	<p>Persamaan penelitian daulu dengan penelitan ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitan terdahulu melalui variabel prespektif Muhammadiyah sedangkan</p>

(Kusumawati, 2019)	<p>Muhammadiyah, sebagai bagian yang terikat dengan masyarakat dan bangsa Indonesia, berusaha untuk mewujudkan kemajuan Indonesia sesuai dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demi keutuhan dan masa depan Indonesia, semua pihak harus berpikir dan bertindak dengan semangat persatuan Indonesia, menjauhi pertentangan terkait sejarah kelahiran dan perkembangan rumusan Pancasila. Tugas sejarah bangsa Indonesia adalah menjaga dan melaksanakan Pancasila dengan sungguh-sungguh dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua pihak seharusnya belajar dari sejarah bahwa upaya untuk mengubah rumusan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan menyebabkan kekacauan politik yang merusak persatuan bangsa dan Negara Indonesia.</p>	<p>penelitian ini menggunakan perspektif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya</p>		
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 Negara Pancasila sebagai <i>Darul Ahdi wa Syahadah</i> (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015)</p>	<p>penelitian ini dilakukan dengan tujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempresentasikan konsep tentang “Negara Pancasila Sebagai <i>Darul Ahdi Wa Syahadah</i>” didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi seperti MKCH Muhammadiyah, Kepribadian Penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan konsep "Negara Pancasila Sebagai <i>Darul Ahdi Wa Syahadah</i>" oleh Pimpinan Pusat</p>	<p>Persamaan penelitian daulu dengan penelitan ini adalah pembahasan mengenai <i>Darul 'Ahdi wa Syahadah</i></p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini variabel penelitian ini adalah warga persyarikatan sedangkan variabel penelitian ini adalah kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah</p>

Muhammadiyah. Konsep ini dilandaskan pada pemikiran-pemikiran resmi yang telah menjadi pedoman dan acuan organisasi seperti MKCH Muhammadiyah, Karakter Muhammadiyah, Khitah Muhammadiyah, Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Indonesia Berkemajuan, pada hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014. Tujuan dari pemikiran tentang Negara Pancasila ini adalah menjadi acuan dan panduan dalam pemikiran dan tindakan bagi semua anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual, berdasarkan pandangan Islam yang maju dan menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah selama ini.

yah (IMM)
Malang Raya

Berdasarkan kajian pada penelitian yang relevan di atas, dimana penelitian yang dilakukan oleh Sinta Utami (2019), dengan hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai *Darul 'Ahdhi Wa Syahadah*.

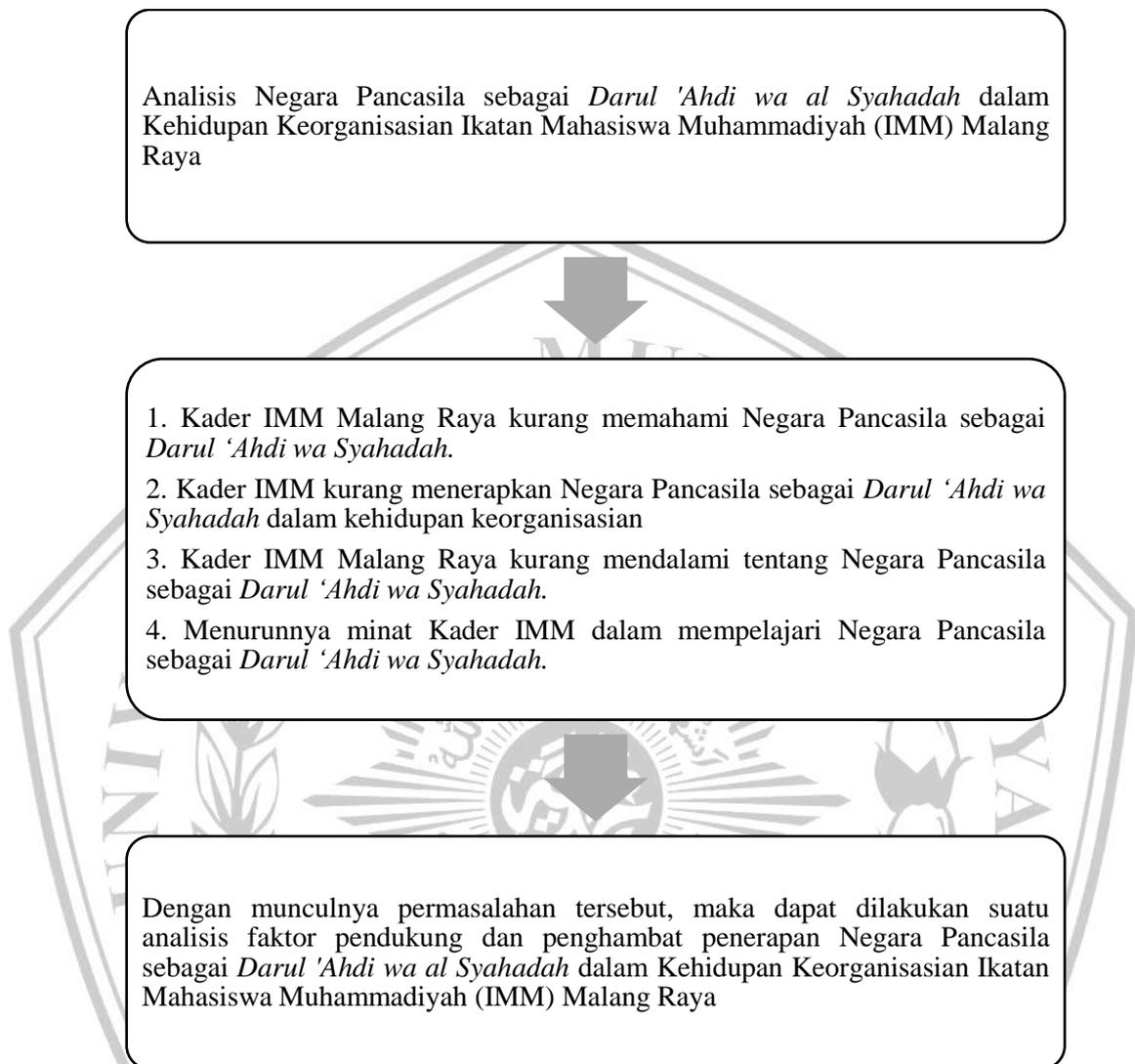
Penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemahaman mahasiswa dalam mengetahui konsep wawasan kebangsaan dan Muhammadiyah dalam memandang negara Pancasila sebagai *Darul 'Ahdhi wa Syahadah*. Hal ini diperkuat karena prodi PPkn dibawah naungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berlandaskan Islam.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif dan Aulia (2017) memberikan dukungan kepada penelitian ini. Penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pentingnya penerapan konsep negara Pancasila sebagai *Darul 'Ahdī wa Syahadah* dalam meningkatkan materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. Hal ini sangat relevan dengan visi dan misi UAD sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang kuat. Oleh karena itu, penerapan konsep tersebut menjadi suatu aspek yang krusial dalam pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.



D. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Dari kerangka berpikir diatas ada beberapa point dari penerapan Negara Pancasila sebagai *Darul 'Ahdhi wa Syahadah* adalah kader dan Pimpinan Cabang IMM Malang raya itu sendiri maka dari itu untuk mengetahui bagaimana pemahaman Kader IMM Malang Raya, apa saja usaha-usaha yang dilakukan dalam pengejawantahan dari Negara Pancasila sebagai *Darul 'Ahdhi wa Syahadah* dan bagaimana hambatan dan solusi yang diberikan Pimpinan Cabang dan Anggota Fokal IMM Malang Raya kepada kader-kader yang masih belum memahami *Darul 'Ahdhi wa Syahadah*.